

AKUNTABILITAS LEMBAGA PENDIDIKAN TENAGA KEPENDIDIKAN SEBAGAI PENGHASIL GURU DI INDONESIA

Lia Yuliana*)

Abstract

The accountability of LPTK as a teacher place creator is one part of its mission and commitment which is aimed to develop education program quality. Although some of that has been changed into university, there is still an effort to produce better qualified teachers, besides producing other professionals. Facing the information and technology era in which fully competitive and collaboration, both recently and future teachers, must hold complete competences such as teaching optimally, mastering field of study, and handling on technology. In addition, they also must have a leadership competence in their attitude and behavior that bring them to be models for their students and communities. Producing qualified teachers is not a simply to be handled by LPTK. There are some internal challenges which need the support of stakeholders with government and community inside. Qualified teacher only can be created by qualified LPTK. Therefore, along with concrete connected party support, internal repairing continually will play an important role in this issue that begins with the student recruitment, teaching and learning, until output quality control. Those should be held by repairing the management institution, teaching atmosphere, and coordination of community as the user of LPTK.

Key word: Accountability, LPTK, Teacher

A. Pendahuluan

Akhir-akhir ini hampir setiap hari media massa mengupas fenomena dan fakta tentang kemunduran pendidikan Indonesia. Berbagai tanggapan muncul dari banyak kalangan, mulai dari pakardan pemerhati pendidikan, birokrat, orangtua, LSM, maupun dari pelaku pendidikan itu sendiri. Tuntutan kepada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) semakin gencar karena dianggap tidak mampu menghasilkan guru-guru berkualitas. Bahkan, rendahnya mutu pendidikan disebutkan sebagai akibat dari perubahan IKIP menjadi universitas, padahal jauh sebelum perubahan itu terjadi kemunduran ini telah dirasakan.

*) Dosen pada Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UNY

Hal ini tidak hanya merupakan akibat dari krisis multidimensi yang dihadapi bangsa Indonesia sejak lima tahun terakhir tetapi juga karena kemauan politik pemerintah yang menempatkan pendidikan sebagai bagian yang tidak menjadi prioritas pembangunan.

Terlepas dari polemik tentang pihak mana yang paling bertanggung jawab terhadap kemunduran ini, LPTK (universitas eks IKIP, STKIP, dan FKIP) sebagai penghasil tenaga kependidikan perlu melakukan refleksi dan otokritik dalam merespon tanggapan diatas. Apakah memang dengan perubahan sebagian besar LPTK menjadi universitas dianggap sudah meninggalkan misi utamanya untuk menghasilkan tenaga kependidikan?

Komitmen LPTK untuk menghasilkan guru-guru yang bermutu tentu bukan sekedar materi tertulis, seperti yang dapat disimak dari pernyataan 6 IKIP pada peresmiannya menjadi universitas yang dilakukan oleh Presiden RI pada tanggal 4 Agustus 1999 yang lalu, tetapi lebih jauh berimplikasi terhadap setiap langkah yang diambil dalam penyelenggaraan universitas baru ini. Tujuan perubahan itu sendiri pada dasarnya adalah untuk mendorong terjadinya interaksi akademik yang lebih luas, melalui berbagai kajian yang interdisipliner, dan penguasaan bidang studi yang lebih baik (Sutjipto, 1999: 4). Dengan perubahan ini pula upaya nyata untuk menghasilkan tenaga kependidikan yang bermutu, disamping tenaga profesional lain, dapat dilakukan dengan lebih baik. Dengan demikian, kekhawatiran masyarakat akan hilangnya lembaga yang bertanggung jawab untuk menghasilkan tenaga kependidikan bagi 200 juta rakyat Indonesia (Jalal dan Supriadi, 2001: 367) dapat diatasi.

Sosok Guru yang Diharapkan

Tidak ada yang bisa membantah bahwa peran guru sejak sejarah pendidikan berkembang adalah mencerdaskan kehidupan manusia. Guru menjadi pendidik masyarakat yang sangat dihormati dan berperan penting dalam pengambilan keputusan. Hampir semua bangsa menempatkan guru pada posisi yang sangat terhormat dalam masyarakatnya. Sehingga pernyataan bahwa pekerjaan guru menentukan wajah sebuah bangsa bukanlah sebuah klise. Tidak berlebihan bila pada suatu kesempatan Prof. Dr. Daoed Yoesoef mengatakan bahwa di dunia ini hanya ada dua profesi. Pertama adalah profesi guru, kedua adalah profesi lain-lain. Menurutnya, profesi pertama dapat menciptakan profesi lain melalui pendidikan. Pernyataan ini diperkuat Hendry Adams (dalam Houston, dkk, 1988: 16): *"A teacher affects eternity: he can never tell where his enfluence stops"*.

Siagian (1999: 5) menegaskan bahwa kenyataan yang ada di lapangan bertentangan dengan gambar idealisasi yang menunjukkan adanya paradoks antara pandangan ideologis dan gambaran ideal seorang guru dengan kenyataan yang sebenarnya (antara guru sebagai seorang panutan dan mempunyai status sosial yang cukup tinggi dan guru yang miskin, yang tidak mampu untuk

hidup layak sebagai warga masyarakat yang dihormati). Berbeda dengan guru di masa lalu, posisi sosial politik guru saat ini semakin rendah sehingga selalu "kalah" untuk diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Baru tahun tahun terakhir ini guru mampu menunjukkan keprihatinannya terhadap masa depannya sendiri melalui dialog dengan pihak legislatif dan pemerintah atau melalui pemogokan.

Surakhmat (1999: 3) menyebutkan, semakin hari kita semakin sukar menemukan sesuatu yang membanggakan didalam kehidupan pribadi dan kehidupan profesional seorang guru, yang dapat memotivasi generasi muda memasuki profesi ini. Semakin lama profesi guru semakin menjadi tempat pelarian, tidak lagi diminati oleh lulusan terbaik seperti halnya pada masa lalu. Guru yang lahir dari produk kurikulum yang sarat penguasaan konten, tidak besar dari kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya.

Mencermati perubahan yang terjadi dalam era informasi yang sarat kompetisi dan kolaborasi ini, sosok guru masa kini dan masa depan adalah yang memiliki kemampuan yang "komplit", yaitu guru yang memiliki kemampuan optimal dalam mengajar, menguasai bidang studinya, dan tidak gagap teknologi. Disamping itu, ia harus memiliki kemampuan memimpin (*leadership*), dan menjadi teladan bagi siswa dan masyarakat dalam segala sikap dan perilakunya.

Profil guru diatas sejalan dengan yang digariskan dalam Sistem Pengembangan Tenaga Kependidikan 21 (SPTK 21: 33 - 34) dan tuntutan kurikulum perguruan tinggi yang diisyaratkan SK Mendiknas Nomor 232/U/2000 dan Nomor 045/U/2002. Menyikapi hal ini, LPTK harus mampu menghasilkan guru yang memiliki kecakapan hidup (*life skills*), kepribadian yang matang, dan penguasaan itmu dan keterampilan profesi kependidikan. Dengan gambaran ini diisyaratkan pula adanya suatu profesi yang matang yang harus dilalui seorang (calon) guru. Proses tersebut hanya akan terjadi bila piranti yang diperlukan tersedia, mulai dari sumberdaya, kurikulum, sampai kepada program yang memungkinkan seseorang berproses menjadi guru. Posisi LPTK dalam hal ini adalah sebagai lembaga yang bertanggung jawab untuk menyiapkan piranti tersebut.

Pembenahan dalam LPTK

Disadari atau tidak untuk menghasilkan guru seperti gambaran di atas memang bukan suatu hal yang mudah. LPTK dengan segala permasalahan internalnya tidak mampu bekerja sendiri tanpa dukungan *stakeholders-nya*, termasuk pemerintah dan masyarakat. Untuk menghasilkan guru yang bermutu diperlukan LPTK yang bermutu pula. Oleh karena itu, pembenahan internal secara berkelanjutan, seiring dengan dukungan konkrit dari pihak-pihak terkait, menjadi bagian terpenting dari penyelenggaraan LPTK itu sendiri, mulai dari proses rekrutmen, proses belajar

ESE23

mengajar, sampai kepada pengendalian mutu keluarannya. Pembenahan tersebut antara lain dilakukan melalui perbaikan manajemen lembaga, pengembangan atmosfir keguruan, dan koordinasi dengan masyarakat pemakai jasa LPTK.

Perbaikan Manajemen Kelembagaan

Prinsip utama pengembangan manajemen LPTK adalah untuk meningkatkan mutu lembaga sehingga memiliki kemampuan untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, dan mutu layanan lembaga (SPTK 21, 2002: 38). Untuk mewujudkan tujuan ini, kemampuan manajerial pada semua lapisan kepemimpinan, mulai dari tingkat rektorat sampai kepada program studi dan sub-bagian, perlu ditingkatkan secara integral. Sebagai lembaga yang mengembangkan ilmu manajemen pendidikan, LPTK seyogyanya menjadi barometer bagi lembaga lain dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan. Sayangnya, dari evaluasi diri yang dilakukan, ternyata masih banyak yang belum mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen pendidikan itu di dalam lembaganya sendiri. Kondisi ini perlu dicermati bersama dan diatasi segera apalagi dalam menghadapi tantangan era global dengan manajemen modern yang lebih efektif.

Pengembangan Atmosfir Keguruan

Kekhasan universitas eks IKIP seyogyanya adalah pada substansi program kependidikan yang tidak hanya mengembangkan bidang keilmuan tetapi juga atmosfir keguruan yang harus dimulai sejak awal mahasiswa menjalani kehidupan kampus. Nuansa keguruan ini tercermin dari sikap dan hubungan sosial sivitas akademika, antar pimpinan dan staf, serta aktivitas, pelayanan, dan produk akademik. Atmosfir akademik yang menunjang akan mempengaruhi cara berpikir, sikap, dan kepribadian mahasiswa untuk mempersiapkan diri menjadi seorang guru sebagaimana yang dilihatnya dari sosok dosen dan aktivitas yang dialaminya sehari-hari di kampus.

Tantangan LPTK dewasa ini adalah membangun citra guru mulai dari pendidikan prajabatan yang dijalannya. Dengan pengembangan atmosfir akademik yang sehat memungkinkannya mengembangkan diri secara optimal sehingga menambah kepercayaan dirinya untuk menjadi guru yang profesional. Pengembangan ini juga meliputi penguasaan teknologi informasi bagi peianggan LPTK, calon guru dan guru, termasuk dalam pembelajaran jarakjauh dengan membangun *virtual community* melalui internet, intranet, dan ekstranet.

Koordinasi dengan Pemerintah dan Masyarakat

Disamping menjadi tanggung jawab LPTK secara akademik, pengadaan guru-guru yang bermutu juga merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan keguruan di LPTK yang memenuhi tuntutan masyarakat global diperlukan koordinasi yang harmonis antara LPTK dengan pemerintah, Dinas Pendidikan, organisasi guru, dan masyarakat pemakai jasa. Koordinasi ini juga mencakup dukungan dan kemauan politik (*political will*) pemerintah untuk memprioritaskan pendidikan, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam penganggaran.

Sebagaimana yang disebutkan oleh Golan (dalam Farrel dan Oliviera, 1993: v), pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang tepat untuk pengembangan guru sebagai sumberdaya terpenting dalam program pendidikan, termasuk dalam hal ini pendidikan prajabatan, sistem rekrutmen, penggajian, sistem pengelolaan, dan pengembangan karir. Disamping itu, tuntutan berbagai pihak untuk menaikkan anggaran pendidikan, antara lain untuk perbaikan mutu guru, akhir-akhir ini sampai 20% dan APBN bukan suatu hal yang berlebihan, apabila dibandingkan dengan anggaran JPS yang mencapai 16% APBN (34 triliun). Dengan anggaran yang layak LPTK dapat melakukan pembenahan secara mendasar, mulai dari proses rekrutmen sampai kepada lulusan, pengadaan fasilitas belajar yang memadai sampai kepada pembenahan pelayanan). Untuk ini diperlukan koordinasi yang harmonis antara LPTK dengan pemerintah dan masyarakat.

Untuk meningkatkan mutu guru, LPTK bersama pemerintah tentu perlu belajar dari negara-negara lain, terutama di Asia, yang juga memiliki permasalahan sosial ekonomi yang kompleks. Pemerintah China, misalnya, pada saat menghadapi masalah kependudukan sangat serius ternyata memiliki komitmen besar terhadap eksistensi dan peningkatan mutu gurunya yang saat ini berjumlah sekitar 12jutaorang.

Menurut Lei (2001:2) sejak tahun 1993 China telah memiliki sistem perundang-undangan tentang hak guru (*Teachers Law*), di dalamnya mencakup hak dan kewajiban seorang guru, kemampuan dan kompetensi yang harus dimilikinya, penilaian dan pengembangan karir guru. Salah satu hak guru adalah mendapatkan pelatihan profesional setiap 5 tahun, terutama untuk meningkatkan kemampuan mengajar, penguasaan bidang studi dan moralitas guru sebagai pendidik. Demikian besarnya komitmen pemerintah terhadap perbaikan mutu pendidikan, karena diyakini sebagai pilar pembangun bangsa, pemerintah China secara konsisten melakukan perbaikan mutu guru. Upaya ini membuahkan hasil yang tidak hanya dapat dilihat dari kemajuan pendidikan tetapi juga dari sektor ekonominya dengan GNP yang hampir mendekati 8% per tahun (Lei, 2001: 1).

Pelajaran lain dapat dipetik dari negara jiran Malaysia yang secara konsisten memberikan perhatian penuh kepada upaya perbaikan mutu guru, sehingga tidak "segan segan" mengeluarkan

ESESST

anggaran rutin untuk beasiswa bagi mahasiswa calon guru mulai dari tahun pertama ia memasuki LPTK sampan kepada proses penempatannya. Setiap tahun pemerintah Malaysia (Bachik, 2001: 10) mengeluarkan dana masing-masing sebanyak RM 550,00 sebulan untuk seorang calon guru sekolah dasar, dan RM 1.156,00 untuk calon guru sekolah lanjutan dalam rangka *quality assurance*. Dengan metode ini, didukung dengan pengembangan LPTK-nya yang berorientasi mutu, secara alamiah pemerintahan Malaysia sudah dapat memastikan mutu masukan yang teruji untuk mendapatkan calon dan guru yang terbaik.

Penutup

Akuntabilitas LPTK sebagai penghasil guru merupakan bagian dari misi dan komitmennya untuk meningkatkan mutu program kependidikan, meskipun sebagian telah mengalami perubahan menjadi universitas. Dengan diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang otonomi daerah, masalah koordinasi perlu diperkuat karena masalah pendidikan guru sangat terkait dengan kesiapan SDM di daerah. Koordinasi LPTK dalam upaya peningkatan mutu guru, terutama dalam konteks otonomi daerah, perlu dilakukannya dengan berbagai pihak secara optimal. Dengan pemimpin politik dan pengambil kebijakan yang berkepentingan dalam meraih dukungan masyarakat LPTK dapat mengangkat isu peningkatan kualitas guru sebagai agenda penting dalam proses pengambilan keputusan. Dengan jajaran Departemen Pendidikan Nasional dan Pemerintah Daerah yang ada di tingkat provinsi sampai ke tingkat kecamatan, yang selama proses desentralisasi berkepentingan untuk mengembangkan daerahnya melalui kewenangan administratifnya, LPTK dapat melakukan koordinasi dalam proses rekrutmen, penempatan, dan pemantauan kinerja lulusannya dalam rangka program kendali mutu. Dengan guru dan organisasinya (PGRI atau sejenisnya) sebagai mitra LPTK dapat memecahkan masalah dan upaya peningkatan mutu, baik dalam penyelenggaraan pendidikan prajabatan maupun dalam jabatan. Koordinasi LPTK dengan masyarakat, termasuk kelompok dunia usaha dan industri sebagai pengguna jasa yang berkepentingan terhadap mutu lulusan dapat dimanfaatkan sebagai wadah pengembangan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan programnya.

DaftarPustaka

Bachik, Abubakar. 2001. "Preservice Teacher Education in Malaysia Current Practices and Future Direction" (makalah pada Seminar Internasional UNESCO-APEID dalam Improving the Methods of Teacher Selection). Hiroshima City: Hiroshima University.

- Bappenas. 1999. "Hasil Konperensi Pendidikan Indonesia. Mengatasi Krisis Menuju Pembaruan." (Dokumen). Jakarta : Bappenas.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Pengembangan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan Abadke-21 (SPTK-21)*. Januari 2002. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Farrel, Joseph P dan Joao B Oliviera (ed.). 1993. "Teachers in Developing Countries. Improving Effectiveness and Managing Costs *EDI Seminar Series*. Washington D.C: The World Bank.
- Houston, W Robert, dkk. 1988. *Touch the Future*. Teach. St. Paul: West Publishing Company.
- Jalal, Fasli dan Dedi Supriadi (ed.). 2001. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Lei, Di. "Country Report From China". 2001. UNESCO-APEID Hiroshima Seminar on Improving the Methods of Teacher Selection. Hiroshima City: Hiroshima University
- Pemerintah Republik Indonesia. 2000. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom. Jakarta: B.P. Panca Usaha.
- Pemerintah Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Otonomi Daerah. Jakarta: Sinar Grafika.
- Siagian, Toenggoel P. 1999. "Permasalahan Mutu Profesional dan Mutu Kehidupan Guru (pendekatan Sosiologis dan Studi Kasus)". (Makalah Disajikan pada Seminar Peningkatan Kemampuan Profesional dan Kesejahteraan Guru pada tanggal 6 Desember 1999). Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Depdiknrs.
- Sutjipto. 1999. "Laporan Rektor IKIP Jakarta atas nama Enam Rektor IKIP dalam Peresmian IKIP menjadi Universitas oleh Presiden Republik Indonesia"
- Sutjipto. 2000. "Efisiensi Pendidikan Dasar Pada Era Otonomi Daerah" (makalah disampaikan pada Seminar Seminar Pendidikan Dasar dalam Hubungannya dengan Pelaksanaan Otonomi Daerah. The Habibie Center, Jakarta, 11-12 Oktober 2000.